

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Taliban merupakan kelompok militan atau yang disebut dengan Mujahiddin Afghanistan, dikenal karena penerapan interpretasi ketat dari hukum Syariah Islam selama pemerintahannya. Taliban, yang berarti “murid” dalam bahasa Pashto, pertama kali muncul pada awal 1990-an di utara Pakistan setelah pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Gerakan ini didominasi oleh orang-orang Pashtun dan muncul di pesantren-pesantren yang biasanya menganut aliran Sunni garis keras. Taliban berjanji untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan berdasarkan Syariah Islam jika mereka berkuasa (BBC NEWS INDONESIA, 2021).

Afghanistan, negara multietnis terkurung daratan yang terletak di jantung Asia tengah-selatan. Ibukota Afghanistan adalah kota terbesarnya, Kabul. Sebuah kota masjid dan taman yang tenang selama masa pemerintahan Kaisar Bābur tahun 1526, pendiri dinasti Mughal, dan selama berabad-abad merupakan sebuah entrepôt penting di Jalur Sutra, Kabul. Bahasa resmi Afghanistan ada dua yakni Dari dan Pashtun, serta memiliki sejumlah suku yaitu, Pashto yang terpusat di bagian timur dan selatan Afghanistan; Tajik berpusat di bagian utara Kabul; Hazara berpusat di Afghanistan Tengah termasuk Bamiyan; Usbek; Aimak; Turkmen; Baluchi; dan Mencius Wakhidan Kyrgyz (Jatmika, 2016).

Afganistan benar-benar terkurung daratan pantai terdekat terletak di sepanjang Laut Arab, sekitar 300 mil ke selatan dan, karena isolasi dan sejarah politiknya yang bergejolak, Afganistan tetap menjadi salah satu daerah dengan survei yang paling buruk di dunia. Demikian pula, nasib sebagian besar negara, ekonominya berantakan dan rakyatnya terpecah dan putus asa. Pada awal abad ke-21, seluruh generasi orang Afghanistan telah dewasa dan tidak tahu apa-apa selain perang. Pendirian Republik Demokratik Afghanistan pada tahun 1978, dan Invasi Soviet ke negara tersebut pada tahun berikutnya, serta konflik yang berlanjut setelah penarikan Soviet pada tahun 1989 sangat mengganggu pola populasi negara tersebut. Pada 1989 Perang saudara dan penghancuran kota dan desa menyebabkan perpindahan massal orang ke dua arah utama emigrasi, terutama ke Pakistan dan Iran, atau pemukiman kembali internal ke Kabul yang relatif aman. (Weinbaum, Dupree, Dupree, Petrov, & Allchin, 2023)



Gambar 1.1 Peta Afghanistan
(Furian, 2014)

Selain itu, konflik panjang menciptakan kelompok dan tentara baru yang terinspirasi oleh Islam. Hal itu menyebabkan turunnya ekonomi di Afghanistan. Berapapun rendahnya ekonomi Afghanistan telah tenggelam selama periode pemerintahan komunis, itu semakin menurun di bawah Mujahidin berikutnya dan pemerintah Taliban. Taliban adalah faksi politik dan agama ultrakonservatif yang muncul di Afghanistan pada pertengahan 1990-an setelah penarikan pasukan Soviet, runtuhnya rezim komunis Afghanistan, dan gangguan berikutnya dalam tatanan sipil (Maley, n.d.). Itu dimulai sebagai kekuatan kecil pelajar dan cendekiawan agama Afghanistan yang berusaha untuk menghadapi kejahatan dan korupsi; faksi berutang namanya, Taliban (Pashto: *Ṭālebān*, "Siswa"), untuk keanggotaan awal ini. Taliban muncul setelah Perang Afghanistan pada 1978–92 (Thomas, 2021). Pemerintahan baru Afghanistan gagal membangun ketertiban sipil di luar Kabul, dan sebagian besar negara itu sering menjadi sasaran pemerasan dan penyerangan dari milisi dan panglima perang setempat.

Pada awalnya Taliban adalah sebuah partai atau kelompok militan yang disebut dengan Mujahidin Afghanistan, yang berusaha untuk mewujudkan keamanan dan stabilitas di negaranya dengan menerapkan Hukum Syariah Islam yang adil dan ketat, serta menjadi tempat perlindungan bagi individu dan organisasi yang terlibat sebagai teroris (Jatmika, 2016). Selain itu, Taliban lebih mengutamakan kesetiaan terhadap ideologinya, kelompoknya dan lain sebagainya, sehingga membuat mereka merasa paling baik, kuat dan paling terhormat dari yang dimiliki oleh kelompok lain atau disebut dengan istilah *Ashabiyah* (Jatmika, 2016). Penurunan kekuatan negara-negara berbasis Muslim dalam *bargaining*

position dengan rezim adikuasa memberikan peluang bagi akselerasi organisasi militan seperti Al-Qaeda atau Taliban (Surwandono, 2012). Hal ini membuat Taliban semakin optimis untuk mewujudkan tujuan dan cita-citanya.

Taliban menghadapi perlawanan yang signifikan, terutama setelah menegaskan interpretasi hukum dan ketertibannya sendiri. Itu menggabungkan ideologi agama yang ketat campuran tradisionalisme Deobandi dan puritanisme Wahhābī dengan kode sosial Pashtun konservatif (Pashtunwali) untuk menciptakan rezim yang represif secara brutal. Kebijakannya termasuk pengecualian hampir total perempuan dari kehidupan publik (termasuk pekerjaan dan pendidikan), penghancuran sistematis peninggalan seni non-Islam (seperti yang terjadi di kota Bamiyan), dan penerapan hukuman pidana yang keras (Britannica, 2023). Landasan ideologi Darul Ulum Deobandi ada tujuh, yaitu 1) Harus sesuai dengan hukum Islam (syariah), 2) Pensucian diri dan pencarian kesempurnaan agama melalui tasawuf, 3) Kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan kawan-kawan, 4) Kegunaan mazhab Hanafi, 5) Aqidah menurut mazhab Hanafi, 6) Pembersihan dari keburukan terutama dosa-dosa syirik, bid'ah, ateisme dan materialisme, 7) Ketaatan terhadap prinsip-prinsip tersebut adalah pribadi disadari oleh pendiri sekolah, Muhammad Qashim dan Rashid Gangohi (Saragih & Afriandi, 2024).

Permasalahan pengabaian yang meluas terhadap supremasi hukum dan impunitas resmi bagi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia merupakan masalah yang serius dan terus berlanjut (*Human Rights Report*, 2019). Terlepas dari pengabaian hak asasi manusia yang meresahkan oleh Taliban, banyak negara khawatir tentang Taliban yang mengizinkan perlindungan Osama bin Laden, yang telah membantu mengatur jaringan pejuang Muslim kelahiran asing selama Perang Afghanistan. Jaringan itu, al-Qaeda, telah berkembang menjadi jaringan militan Islam yang melakukan perjuangan keras untuk membebaskan dunia Islam dari pengaruh non-Muslim dan telah mengatur beberapa serangan terhadap Amerika Serikat. Bahkan setelah bin Laden dan al-Qaeda ditemukan bertanggung jawab atas serangan di World Trade Center di New York City dan di Pentagon di luar Washington, DC, yang terjadi di 11 September 2001, Taliban menolak mengekstradisi bin Laden. Amerika Serikat dan sekutunya mulai membombardir Afghanistan pada bulan Oktober dan mendukung upaya Aliansi Utara, sekelompok faksi anti-Taliban di Afghanistan yang menentang pengambil-alihan negara oleh Taliban (Rubin, 2021).

Pada awal Desember Aliansi Utara berhasil menumbangkan rezim Taliban. Meskipun didorong dari kekuasaan dan retak, Taliban tetap bertahan, dan banyak dari anggota intinya tetap bebas selama Perang Afghanistan. Amerika Serikat dan tidak sedikit sekutu yang datang ke Afghanistan untuk menumbangkan rezim Taliban, namun mereka masih dapat bangkit dari keterpurukan selama kurang lebih 20 tahun. Taliban dan Amerika Serikat mulai bertemu pada 2018, dengan bantuan Arab Saudi, Pakistan, dan Uni Emirat Arab, satu-satunya negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan kedua belah pihak. Diskusi difokuskan pada penarikan pasukan AS dari Afghanistan, meskipun Amerika Serikat juga berusaha mendamaikan Taliban dan pemerintah pusat. Diskusi akhirnya diadakan secara resmi dengan pemerintah pusat pada tahun 2019, yang pada bulan Juli menghasilkan kesepakatan tentang prinsip-prinsip umum untuk negosiasi di masa depan, tetapi perwakilan Taliban tetap fokus untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat terlebih dahulu. Mereka dilaporkan mencapai kesepakatan pada prinsipnya pada bulan September, tetapi diskusi terganggu setelah serangan oleh Taliban menewaskan seorang anggota layanan AS (International Crisis Group, 2020).

Kesepakatan dengan Amerika Serikat ditandatangani pada akhir Februari 2020 (Anugerah & Purba, 2021). Sebagai imbalan atas penarikan penuh pasukan AS selama periode 14 bulan, Taliban setuju untuk mengakhiri serangannya terhadap pasukan AS dan mencegah al-Qaeda, Negara Islam di Irak dan Levant (ISIL; juga disebut Negara Islam di Irak dan Suriah [ISIS]), dan afiliasi mereka dari operasi di Afghanistan. Kesepakatan itu juga termasuk kesepakatan untuk memulai pembicaraan dengan pemerintah pusat dalam waktu 10 hari, tetapi negosiasi ditunda hingga September karena keengganan pemerintah pusat untuk melakukan pertukaran tahanan yang dijanjikan kepada Taliban oleh Amerika Serikat. Sedikit kemajuan dicapai selama negosiasi, yang berlangsung hingga 2021. Namun demikian, pada bulan April Amerika Serikat mengulangi komitmennya untuk menyelesaikan penarikannya, meskipun batas waktu penarikan ditunda dari Mei hingga September. (Britannica, 2023)

Dinamika kekuasaan pasca transisi di Afghanistan dipengaruhi aktor-aktor dalam negeri dan luar negeri. Taliban yang awalnya mendapat partisan dalam negeri, sedikit demi sedikit mulai mendapatkan perlawanan. Beberapa diantaranya adalah kelompok *Islamic State of Khorasan Province* (IS-KP) dan National Resistance Front (NRF) menjadi kelompok yang mengancam Taliban di Afghanistan (Crisis Group, 2022). Respon internasional terkait kekuasaan Taliban pasca transisi juga mendapat tekanan terkait tujuan yang harus dicapai. Pemerintah Taliban harus mendapatkan legitimasi untuk bisa diakui oleh negara lain,

terutama negara yang pernah mengakui Afghanistan sebelum masa transisi. Hal ini karena Taliban telah menyingkirkan perempuan dari kehidupan politik di Afghanistan (Dayal, 2023). Namun eksistensi Taliban terus bertahan dan semakin mendapatkan sorotan terutama media internasional yang mengangkat permasalahan keamanan atau hak asasi manusia yang terjadi di Afghanistan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dalam membantu penelitian ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Strategi Pemerintahan Taliban dalam Mempertahankan dan Mendapatkan Pengakuan Afghanistan Baik dari Dalam Maupun Dari Luar atas Tekanan Politik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri”

C. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Kedaulatan

Kedaulatan secara garis besar adalah kekuatan yang mampu mengontrol pemerintahannya sendiri (Cambridge University, 2023). Teori Kedaulatan Negara Teori yang menurut Jean Bodin, masuk dalam kategori kedaulatan negara. Singkatnya, teori kedaulatan negara adalah teori yang menganggap negara sebagai badan hukum dianggap memiliki kewajiban dan hak serta dapat melakukan tindakan atau perbuatan hukum sekaligus pendukung hak dan kewajiban. Kemudian, dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, negaralah pemegang kekuasaan tertinggi yang menciptakan hukum. Dalam teori ini dikenal dengan istilah “*Verkulprings Theorie*” yang menyatakan bahwa negara menjelma dalam tubuh raja; negara adalah raja itu sendiri (Hukum Online, 2023).

Selain itu ada juga kedaulatan politik, kedaulatan hukum, dan kedaulatan teritorial. Bahwa kedaulatan politik berkaitan dengan legitimasi dan kewenangan menjalankan kekuasaan dalam proses pemerintahan dalam mengatur urusan rakyat; kedaulatan hukum bertumpu pada independensi konstitusional sebagai dasar untuk membuat undang-undang bagi subjek, membatalkan undang-undang sudah dibuat, dan mengubah undang-undang yang sudah usang; sedangkan kedaulatan teritorial mencakup adanya hak atas wilayah geografis tertentu yang dapat berbatasan dengan wilayah udara, perairan, dan darat (Onwe, 2015). Hal

tersebut juga mendukung bahwa suatu negara yang ingin dianggap negara harus memiliki; tanah atau wilayah, rakyat, pemerintahan dan pengakuan dari dalam dan luar negeri.

Konsep kedaulatan menjadi kunci bagi Taliban dalam mempertahankan kekuasaannya di Afghanistan karena hal tersebut mencerminkan otonomi dan kontrol penuh atas wilayah dan rakyat mereka. Bagi Taliban, kedaulatan bukan hanya tentang kekuasaan politik, tetapi juga tentang penerapan aturan dan nilai-nilai yang mereka anut secara ketat, termasuk interpretasi mereka tentang syariah Islam. Dengan menguatkan konsep kedaulatan, mereka dapat membenarkan langkah-langkah mereka dalam menegakkan kebijakan yang seringkali kontroversial, serta melawan campur tangan asing yang dianggap sebagai ancaman terhadap identitas dan otonomi Afghanistan.

2. Konsep Rezim

Perspektif yang berfokus pada kerja sama antar aktor dalam bidang hubungan internasional tertentu. Sebuah rezim internasional dipandang sebagai lingkungan di mana ekspektasi para aktor bertemu di area isu tertentu. Seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur implisit dan eksplisit. Area isu terdiri dari interaksi di berbagai area seperti nonproliferasi nuklir, telekomunikasi, hak asasi manusia, atau masalah lingkungan. Ide dasar di balik rezim internasional adalah bahwa mereka menyediakan perilaku negara yang transparan dan tingkat stabilitas di bawah kondisi anarki dalam sistem internasional. Analisis rezim internasional telah menawarkan tempat pertemuan untuk perdebatan antara berbagai aliran pemikiran dalam teori Hubungan Internasional.

Konsep rezim menjadi salah satu upaya penting bagi Taliban dalam mendapatkan kekuasaan di Afghanistan karena hal tersebut memberi legitimasi dan struktur organisasional yang kuat bagi gerakan mereka. Dengan merancang sebuah rezim, Taliban dapat menawarkan visi politik dan sosial yang mereka anut kepada masyarakat Afghanistan, serta memberikan kerangka kerja untuk pemerintahan yang mereka harapkan akan mereka jalankan. Selain itu, melalui konsep rezim, mereka dapat memobilisasi dukungan internal dan eksternal, baik dari pendukung di dalam negeri maupun dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan serupa di luar Afghanistan.

3. Konsep Kekuasaan

John Locke, seorang filsuf dan pemikir politik abad ke-17, menyumbangkan pandangannya tentang teori kekuasaan dalam karyanya yang terkenal, "Two Treatises of

Government" (Dua Traktat tentang Pemerintahan). Menurut Locke, hak asasi manusia dan kebebasan individu adalah prinsip dasar dalam masyarakat. Dia meyakini bahwa pemerintah sah hanya dapat diterima jika mendapat dukungan dari rakyat yang diperintah, dan kekuasaan pemerintah seharusnya terbatas oleh hukum alam.

Dalam perspektif Locke, kekuasaan pemerintah berasal dari kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Rakyat memberikan kuasa kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak individu mereka, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan properti. Namun, jika pemerintah gagal melaksanakan tugasnya atau melanggar hak-hak tersebut, rakyat memiliki hak untuk memberontak dan menggulingkannya.

Stephen D. Krasner, seorang ahli hubungan internasional, menyumbangkan teori kekuasaan yang dikenal sebagai "pembentukan struktur". Menurut Krasner, kekuasaan tidak hanya terkait dengan negara atau pemerintah, tetapi juga melibatkan kelompok-kelompok atau individu dalam masyarakat internasional. Krasner menyoroti pentingnya peran institusi dan norma dalam membentuk struktur kekuasaan di tingkat internasional.

Miriam Budiardjo, seorang ilmuwan politik Indonesia, memperkaya pandangan kekuasaan dengan fokus pada konteks lokal dan negara berkembang. Dia menyoroti bagaimana kekuasaan dapat dijalankan melalui struktur politik dan ekonomi yang mungkin berbeda dalam konteks negara-negara dengan kondisi sosial yang beragam. Budiardjo juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

Dengan demikian, teori kekuasaan dari Locke, Krasner, dan Budiardjo masing-masing memberikan kontribusi unik terhadap pemahaman kita tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dan diatur dalam konteks politik, baik itu dalam kerangka nasional maupun internasional.

Konsep kekuasaan menjadi instrumen utama bagi Taliban dalam memperoleh serta mempertahankan kekuasaan di Afghanistan karena kekuasaan memberi mereka kontrol atas sumber daya, institusi, dan populasi. Dengan memanfaatkan kekuasaan, Taliban dapat mengamankan posisi dominan mereka dalam struktur politik dan sosial Afghanistan, serta menegakkan otoritas mereka dengan keras terhadap pihak yang menentang atau mengancam kekuasaan mereka. Selain itu, kekuasaan memberi mereka keunggulan dalam negosiasi politik dan strategi militer, memungkinkan mereka untuk menangani tantangan internal dan eksternal yang mengancam stabilitas rezim Taliban.

D. Hipotesis

Dengan merujuk pada informasi yang telah penulis dapatkan, maka penulis menarik suatu hipotesis bahwa Taliban membentuk strategi untuk dapat mendorong pemerintahannya dalam memperoleh kekuasaannya, melalui konsep kedaulatan menjadi landasan utama dalam narasi mereka, yang mereka artikan sebagai kontrol penuh atas wilayah Afghanistan serta penerapan hukum berdasarkan interpretasi mereka tentang syariah Islam. Dengan rezim yang mencerminkan visi politik dan sosial mereka, digunakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan dengan memobilisasi dukungan internal dan eksternal. Hal ini didukung dengan instrumen kekerasan yang menjadi kunci dalam pelaksanaan kekuasaan mereka, digunakan untuk menegakkan otoritas, menindas oposisi, dan menanggapi tantangan baik dari dalam maupun luar Afghanistan. Dengan demikian, kedaulatan, rezim, dan kekuasaan dengan instrumen kekerasan membuat Taliban dapat menguasai wilayah, rakyat serta pengakuan negara.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif - kualitatif. Metode ini merupakan sebuah metode yang menggambarkan fakta-fakta, dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus, tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena, dengan memanfaatkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, website dan tulisan-tulisan yang ada di internet khususnya website UMY, berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni melalui penelitian pustaka (*library research*) yang memanfaatkan data-data melalui perpustakaan untuk mendukung penelitian yang diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, website dan bahan-bahan lain sesuai dengan topik yang akan diteliti dan dapat diuji kebenarannya.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini meliputi tahun 2019 pada negosiasi awal Taliban dengan Amerika, untuk mengusir Amerika dari Afghanistan dan mengambil alih kursi pemerintahan sampai tahun 2024. Penelitian ini menilik dari aspek internal dan eksternal kebijakan Taliban melakukan pengambilalihan dan mengendalikan serta mempertahankan kekuasaan di Afghanistan.

G. Tujuan penelitian

Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengidentifikasi strategi dan dampak pemerintahan Taliban sebagai aktor non-negara yang melakukan pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan setelah 20 tahun lamanya, yang saat ini telah berhasil mengambil kursi pemerintahan di Afghanistan, Serta menjadikan Taliban sebagai pemerintahan dan merubah diri menjadi aktor negara. Penelitian ini juga bertujuan untuk sarana pembuktian penulis dalam mempraktikkan ilmu-ilmu yang didapat selama proses perkuliahan melalui aplikasi teori dalam penelitian ini

H. Sistematika Penulisan

Pada bab satu, merupakan pendahuluan yang diringkas secara singkat untuk menjelaskan dan mendeskripsikan secara garis besar penelitian yang diawali dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Landasan Teori dan Konseptual, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Dalam bab dua, penulis menjabarkan Transisi Kekuasaan dari pemerintahan Afghanistan menjadi Taliban. Selain itu intervensi Amerika Serikat yang mulai hilang di Afghanistan, Melalui aktor-aktor dalam negeri yang mempengaruhi perubahan arah politik Afghanistan.

Dalam bab tiga, penulis menjabarkan kebijakan-kebijakan di dalam maupun luar negeri, yang dilakukan Taliban dalam mempertahankan Afghanistan dari intervensi dan tekanan pihak asing secara umum serta menganalisa dampaknya.

Dalam bab empat, ini berisi kesimpulan, kemajuan dan keterbatasan Taliban dalam kepemimpinan di Afghanistan selama beberapa tahun yang sudah berjalan.